



**PENETAPAN**

**Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Wgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**NAMU YANTO UMBU LAPU,** lahir di Tandula Jangga, Tanggal 30 Agustus 1991, Alamat Tandula Jangga RT.009/RW.005, Kelurahan/ Desa Tandula Jangga, Kecamatan Nggara Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**ANITA THERESIA KOPA RIHI,** Lahir di Tandairotu-Sumba Timur, 27 Agustus 1987, Alamat Tandula Jangga, RT.009/RW.005, Kelurahan/ Desa Tandula Jangga, Kecamatan Nggara Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Honorer, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

**PEMOHON I** dan **PEMOHON II** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;  
Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;  
Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dan Para Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 7 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Wgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 268/Pdt.P/2023/PN Wgp, tertanggal 14 Desember 2023, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Suami Istri yang Menikah Secara Sah Di Gereja Kristen Sumba Jemaat Payeti Menurut Tata Cara Agama Kristen Surat Nikah Nomor: 314/II.2.f/BPMJ-GKS.P/X/2023 Tanggal 08 Oktober 2023 ;
2. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Telah Tercatat Pula Di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomo: 5311-KW-04122023-0001 Tanggal 04 Desember 2023
3. Bahwa Para Pemohon Telah Dikaruniai 1 (Satu) Orang Anak, Pemohon Yang Lahir Sebelum Para Pemohon Menikah Secara Sah yaitu :
  - CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI, anak Laki-laki Lahir Di Payeti, 29 Agustus 2022 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 5311-LT-01122023 tanggal 29 Agustus 2022.
4. Bahwa Kelahiran Anak Dari Para Pemohon tersebut di atas Sebelum Para Pemohon Melangsungkan Perkawinan Secara Sah Menurut Agama Kristen Dan Negara;
5. Bahwa oleh karena Anak Dari Para Pemohon Lahir Sebelum Para Pemohon Menikah Secara Sah, Maka Di Dalam Penerbitan Akte Kelahiran Anak Tersebut Diatas Sudah Tercantum Anak dari NAMU YANTO UMBU LAPU dan ANITA THERESIA KOPA RIHI belum Tercatat Secara Sah, sehingga tujuan dari Para Pemohon Mengajukan Permohonan ini agar kiranya Anak Dari Para Permohonan mendapat kepastian Hukum yang menyatakan Sah Anak Kandung Dari Para Pemohon.
6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Pasal 52 tentang Pengesahan Anak yang lahir seblum Perkawinan Secara Agama/Kepercayaan harus melalui Penetapan Pengadilan, dan Peraturan Presiden no. 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk di Pencatatan Sipil, serta demi kepentingan pengurusan surat-surat berharga bagi diri Para Pemohon maupun Anak Para Pemohon dan juga guna tertib Administrasi bagi diri Para Pemohon maka para Pemohon berniat untuk mengajukan Permohonan dan memperoleh Penetapan Pengesahan Anak Para Pemohon dimaksud.

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan para pemohon tersebut diatas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada bapak ketua pengadilan negeri waingapu Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya:
2. Menyatakan bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Payeti Menurut Tata Cara Agama Kristen Surat Nikah Nomor: 314/II.2.f/BPMJ-GKS.P/X/2023 Tanggal 08 Oktober 2023; dan telah tercatat pula Didinas Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumba Timur Nomor: 5311-KW-04122023-0001 Tanggal 04 Desember 2023; adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan bahwa anak atas nama:
  - CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI, anak Laki-laki Lahir di Payeti, 29 Agustus 2022, berdasarkan akte kelahiran nomor : 5311-LT-01122023 tanggal 29 Agustus 2022.
4. Menyatakan sah menurut hukum didalam akte kelahiran anak dari para pemohon tersebut:
5. Memerintahkan pemohon untuk menyerahkan Salinan penetapan ini kepada pejabat atau pegawai kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan Sah secara hukum. Pada akte kelahiran anak dari para pemohon tersebut, serta didaftarkan kedalam buku registar yang diperuntukkan untuk keperluan itu dan diberikan catatan pinggir.
6. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Wgp



Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 511043008910002, atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 53111667088770002, atas nama Pemohon II, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Nikah Nomor 314/II.2.f/BPMJ-GKS.P/X/2023, tertanggal 8 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-04122023-0001 (Suami), yang dikeluarkan pada tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-04122023-0001 (Istri), yang dikeluarkan pada tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-01122023-0016 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2023, atas nama CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5311040908170004, atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti ternyata fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti fotocopy tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, di bawah janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Saksi STEBASTIANUS KALIKIT PARI:**

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dalam kesehariannya tinggal di Tandula Jangga, RT.009/RW.005, Desa Tandula Jangga, Kecamatan Nggara Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan anak atas nama anak **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI**;
- Bahwa para Pemohon adalah benar orang tua kandung dari anak **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI**;
- Bahwa anak **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI** tersebut lahir dari kandungan Pemohon II dan dari ayahnya Pemohon I, namun sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa anak **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI** lahir pada tanggal 29 Agustus 2022;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba, Jemaat Payeti, pada tanggal 8 Oktober 2023 di depan pemuka agama yang bernama Pendeta LUSANDRI KARANGGULIMU, M.Th., kemudian perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 4 Desember 2023;
- Bahwa benar di dalam Akta Kelahiran anak **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI** hanya tertulis nama Ibunya (Pemohon II) yaitu **ANITA THERESIA KOPA RIHI** tanpa nama Pemohon I dan Para Pemohon ingin merubah Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dengan mencantumkan nama ayah atau Pemohon I yaitu **NAMU YANTO UMBU LAPU** pada kutipan akta kelahiran anak **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI**;
- Bahwa Para Pemohon sudah lama hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah sejak tahun 2020 atau setelah urus adat dan pada tanggal 29 Agustus 2022 lahirlah anak **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI**, kemudian barulah pada tanggal 4 Desember 2023 Para Pemohon mencatatkan perkawinannya ke Kantor Dispenduk, artinya anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa para pemohon sebelumnya telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tahun 2020 yang tanggalnya tidak diingat lagi oleh saksi dan saat itu anak **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI** belum lahir, kemudian pada tanggal 8 Oktober 2023 Para Pemohon menikah menurut tata cara agama kristen protestan dan pada

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2023 perkawinan tersebut dicatatkan (Be'es) pada dinas kependudukan sumba timur;

- Bahwa Penetapan Pengadilan ini akan digunakan untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran anak **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI** yang tidak mencantumkan nama Pemohon I (ayah);
- Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan Para Pemohon sendiri dan untuk kepentingan Pemohon II yang saat ini sedang melengkapi persyaratan administrasi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta untuk kepentingan administrasi kependudukan anak Para Pemohon serta pendidikan anak **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI** nantinya;
- Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon belum menikah menurut tata cara agama kristen protestan dan perkawinan tersebut belum dicatatkan (Be'es) pada Kantor Dispenduk Kabupaten Sumba Timur, sehingga nama Pemohon I belum tercantum dalam akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I mengakui bahwa anak **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI** merupakan anak kandung dari Pemohon I dan keluarga dari Pemohon I tidak keberatan jika nama dari Pemohon I ditambahkan pada kutipan akta kelahiran anak **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI**;
- Bahwa anak **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI** selama ini tinggal bersama dengan Para Pemohon dan segala kebutuhan anak tersebut ditanggung oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap saksi tersebut Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

## II. Saksi RAMBU TAWURU MAY, SST:

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dalam kesehariannya tinggal di Tandula Jangga, RT.009/RW.005, Desa Tandula Jangga, Kecamatan Nggara Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Wgp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan anak atas nama anak **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI**;
- Bahwa para Pemohon adalah benar orang tua kandung dari anak **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI**;
- Bahwa anak **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI** tersebut lahir dari kandungan Pemohon II dan dari ayahnya Pemohon I, namun sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa anak **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI** lahir pada tanggal 29 Agustus 2022;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba, Jemaat Payeti, pada tanggal 8 Oktober 2023 di depan pemuka agama yang bernama Pendeta LUSANDRI KARANGGULIMU, M.Th., kemudian perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 4 Desember 2023;
- Bahwa benar di dalam Akta Kelahiran anak **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI** hanya tertulis nama ibunya (Pemohon II) yaitu **ANITA THERESIA KOPA RIHI** tanpa nama Pemohon I dan Para Pemohon ingin merubah Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dengan mencantumkan nama ayah atau Pemohon I yaitu **NAMU YANTO UMBU LAPU** pada kutipan akta kelahiran anak **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI**;
- Bahwa Para Pemohon sudah lama hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah sejak tahun 2020 atau setelah urus adat dan pada tanggal 29 Agustus 2022 lahirlah anak **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI**, kemudian barulah pada tanggal 4 Desember 2023 Para Pemohon mencatatkan perkawinannya ke Kantor Dispenduk, artinya anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa para pemohon sebelumnya telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tahun 2020 yang tanggalnya tidak diingat lagi oleh saksi dan saat itu anak **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI** belum lahir, kemudian pada tanggal 8 Oktober 2023 Para Pemohon menikah menurut tata cara agama kristen protestan dan pada

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2023 perkawinan tersebut dicatatkan (Be'es) pada dinas kependudukan sumba timur;

- Bahwa Penetapan Pengadilan ini akan digunakan untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran anak **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI** yang tidak mencantumkan nama Pemohon I (ayah);
- Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan Para Pemohon sendiri dan untuk kepentingan Pemohon II yang saat ini sedang melengkapi persyaratan administrasi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta untuk kepentingan administrasi kependudukan anak Para Pemohon serta pendidikan anak **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI** nantinya;
- Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon belum menikah menurut tata cara agama kristen protestan dan perkawinan tersebut belum dicatatkan (Be'es) pada Kantor Dispenduk Kabupaten Sumba Timur, sehingga nama Pemohon I belum tercantum dalam akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I mengakui bahwa anak **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI** merupakan anak kandung dari Pemohon I dan keluarga dari Pemohon I tidak keberatan jika nama dari Pemohon I ditambahkan pada kutipan akta kelahiran anak **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI**;
- Bahwa anak **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI** selama ini tinggal bersama dengan Para Pemohon dan segala kebutuhan anak tersebut ditanggung oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap saksi tersebut Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Wgp





sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg/ pasal 163 HIR Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim perkara *a quo* membaca permohonan Para Pemohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon Penetapan pengesahan anak atas nama **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI** sehingga nantinya Para Pemohon dapat diberikan izin melakukan perubahan akta kelahiran anak tersebut yaitu terkait dengan penambahan nama ayah kandung (Pemohon I) pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas anak **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI** yang sebelumnya hanya tertulis, atas nama anak dari seorang Ibu yaitu **ANITA THERESIA KOPA RIHI** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Timur, maka pada akta kelahiran tersebut perlu untuk dilakukan penambahan nama ayah kandung (Pemohon I) atau diberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang menjelaskan bahwa Pemohon I adalah orang tua yang sah dari anak CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi kode yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide: *Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa selain bukti-butki surat tersebut di atas Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, namun terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum dalam permohonan tersebut sebelum menyatakan petitum permohonan tersebut dinyatakan dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian serta pengakuan dari Para Pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagaimana Bukti P-1, P-2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk dan Bukti P-7 yaitu Kartu Keluarga (KK) dan selama ini Para Pemohon berdomisili sehari-hari di Tandula Jangga, RT.009/RW.005, Desa Tandula Jangga, Kecamatan Nggara Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan anak sehingga dapat diberikan ijin melakukan perubahan akta kelahiran anak Para Pemohon yaitu terkait penambahan nama ayah (Pemohon I) pada kutipan akte kelahiran anak atas nama anak CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI, yang sebelumnya hanya tertulis, atas nama anak dari seorang Ibu yaitu **ANITA THERESIA KOPA RIHI**, atau memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak tersebut yang dapat menjelaskan bahwa Pemohon I adalah orang tua yang sah dari anak CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI;
- Bahwa anak CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI adalah anak kandung dari pasangan suami istri **NAMU YANTO UMBU LAPU dan ANITA THERESIA KOPA RIHI** (Para Pemohon) sebagaimana dijelaskan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 5311040908170004, atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan pada tanggal 17 November 2023 (Vide Bukti P-7);
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah dilakukan pencatatan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba sebagaimana Kutipan akta kelahiran Nomor 5311-LT-01122023-0016 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2023, atas nama CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI (vide Bukti P-6);

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut tatacara agama Protestan, di Gereja Kristen Sumba, Jemaat Payeti, pada tanggal 8 Oktober 2023 di depan pemuka agama yang bernama Pendeta LUSANDRI KARANGGULIMU, M.Th., sebagaimana Surat Nikah Nomor 314/II.2.f/BPMJ-GKS.P/X/2023, tertanggal 8 Oktober 2023 (vide Bukti P-3) dan pernikahan secara agama Kristen protestan tersebut telah dilakukan pencatatan pada Kantor Pencatatan Sipil Sumba Timur pada tanggal 4 Desember 2023, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-04122023-0001 (Suami dan Istri), yang dikeluarkan pada tanggal 4 Desember 2023 (vide Bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa sebelum menikah, para Pemohon telah hidup bersama layaknya suami istri namun belum ada ikatan perkawinan dan akhirnya pada tanggal 29 Agustus 2022 lahirlah anak yang bernama CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI, sedangkan Para Pemohon baru menikah secara sah pada tanggal 4 Desember 2023, artinya anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa penetapan pengesahan anak ini akan dipergunakan untuk *pertama*, melakukan perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, sehingga diketahui bahwa Pemohon I adalah benar ayah kandung dari anak CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI, *kedua*, untuk masa depan anak nantinya sehingga anak menjadi tahu bahwa Pemohon I adalah ayah kandung *ketiga*, untuk tertib administrasi kependudukan bagi Para Pemohon sendiri dan untuk kepentingan Pemohon II yang saat ini sedang melengkapi persyaratan administrasi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan bagi anak di masa depannya dan keempat adalah untuk administrasi pendidikan bagi anak CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI nantinya;
- Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon belum menikah secara sah menurut hukum dan anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah sehingga nama Pemohon I tidak ditambahkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, namun saat ini para pemohon telah menikah secara sah;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I mengakui bahwa anak CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI merupakan anak kandung dari Pemohon I dan keluarga dari Pemohon I sendiri tidak ada yang keberatan nama Pemohon I dicantumkan pada kutipan akta kelahiran atas nama anak CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI;
- Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon penetapan pengesahan Anak sehingga Para Pemohon bisa meminta untuk diberikan izin mengubah akta kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut, karena saat ini para Pemohon telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi *voluntair*, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim perkara *a quo* mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Para Pemohon maka Hakim perkara *a quo* akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang atau tidak memeriksa dan memutus terhadap perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:

- (1) *Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menurut Hakim perkara *a quo* secara administrasi pada intinya menyatakan bahwa pencatatan perubahan akta kelahiran merupakan peristiwa penting lainnya yang harus dilaksanakan berdasarkan

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri, dimana Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Pada Buku II Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menjelaskan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari bukti Bukti P-1, P-2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk dan Bukti P-7 yaitu Kartu Keluarga (KK) serta keterangan saksi STEBASTIANUS KALIKIT PARI dan saksi RAMBU TAWURU MAY, SST., diketahui bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili sehari-hari yaitu di Tandula Jangga, RT.009/RW.005, Desa Tandula Jangga, Kecamatan Nggara Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, sehingga masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, oleh karena itu Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, maka Hakim yang mengadili perkara Pemohonan ini akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada petitum nomor 1 (satu) Para Pemohon memohon agar "*Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya*";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1 (satu) Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan petitum-petitum di bawahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dalam petitum nomor 2 (dua) meminta untuk; "*Menyatakan bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Payeti Menurut Tata Cara Agama Kristen Surat Nikah Nomor: 314/II.2.f/BPMJ-GKS.P/X/2023 Tanggal 08 Oktober 2023; dan telah tercatat pula Didinas Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumba Timur Nomor: 5311-KW-04122023-0001 Tanggal 04 Desember 2023; adalah sah menurut hukum*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Wgp





dan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *perkawinan tersebut harus dicatatkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P-3 yaitu berupa Surat Nikah Nomor 314/II.2.f/BPMJ-GKS.P/X/2023, tertanggal 8 Oktober 2023, dan Bukti Surat P-4 dan P-5 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5311-KW-04122023-0001 (Suami dan Istri), yang dikeluarkan pada tanggal 4 Desember 2023, serta keterangan saksi STEBASTIANUS KALIKIT PARI dan saksi RAMBU TAWURU MAY, SST., di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 8 Oktober 2023 Para Pemohon telah melangsung perkawinan secara agama kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba, Jemaat Payeti, di depan pemuka agama yang bernama Pendeta LUSANDRI KARANGGULIMU, M.Th., dan perkawinan tersebut pada tanggal 4 Desember 2023 oleh Para Pemohon telah dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II secara hukum telah sah sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian terhadap petitum nomor 2 (dua) permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas anak CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI, dan surat P-7 yaitu berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5311040908170004, atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2023, serta keterangan saksi STEBASTIANUS KALIKIT PARI dan saksi RAMBU TAWURU MAY, SST., di dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI, adalah anak kandung dari Para Pemohon yang dilahirkan dari kandungan Pemohon II sendiri, namun lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat menjadi anak sah (*anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah*) apabila laki-laki tersebut atau ayah biologis dari anak tersebut, menikahi Ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan, dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan saksi STEBASTIANUS KALIKIT PARI dan saksi RAMBU TAWURU MAY, SST., yang menerangkan jika di dalam kutipan akta kelahiran atas nama anak CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI hanya tercantum nama Pemohon II (**ANITA THERESIA KOPA RIHI**) saja sedangkan nama Pemohon I (**NAMU YANTO UMBU LAPU**) tidak tercantum pada kutipan akta kelahiran tersebut, padahal Pemohon I merupakan ayah kandung/biologis dari anak CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI, hal ini terjadi di karenakan anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, namun saat ini Para Pemohon telah menikah secara sah, sehingga tidak ada halangan lagi untuk menambahkan nama Pemohon I pada kutipan akta kelahiran atas nama CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan memperhatikan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Pengadilan berpendapat anak atas nama CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI adalah anak sah dari Para Pemohon, oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk diizinkan melakukan perubahan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI yaitu penambahan nama Pemohon I pada kutipan akta kelahiran anak CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI beralasan hukum dan tujuan dari penambahan nama Pemohon I yaitu tujuan *pertama*, membenarkan bahwa Pemohon I adalah benar ayah kandung dari anak CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI yang telah menikah secara sah menurut hukum, *Kedua*, untuk masa depan anak nantinya sehingga anak menjadi tahu bahwa Pemohon I adalah ayah kandung anak. *ketiga*, untuk tertib administrasi kependudukan baik bagi kepentingan Para Pemohon sendiri maupun untuk anak di masa depannya dan saat ini terdapat kepentingan yang sangat mendesak yaitu untuk kepentingan Pemohon II yang saat ini sedang melengkapi persyaratan administrasi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), *keempat* untuk keperluan pendidikan anak Para Pemohon nantinya sehingga nantinya di dalam pencantuman nama orang tua pada Raport maupun ijazah atas nama anak CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI tertulis nama orangtuanya adalah Pemohon I;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1973 dengan kaidah hukum "*Permohonan untuk pengesahan anak diluar nikah harus diajukan oleh orang tuanya sendiri*";

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah dinyatakan sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak Para Pemohon yang lahir di luar perkawinan telah pula oleh Para Pemohon sendiri dinyatakan sebagai anak sah dari Para Pemohon dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon pada petitum nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta untuk pengesahan anak dan perubahan akta kelahiran anak dari Para Pemohon yaitu penambahan nama Ayah **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI** (pemohon I) di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak dari para pemohon sebagaimana pada petitum nomor 4 (empat) telah beralasan hukum dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta yang terpenting adalah demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut sehingga petitum nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum yang nomor 5 (lima) yaitu meminta: *"Memerintahkan pemohon untuk menyerahkan Salinan penetapan ini kepada pejabat atau pegawai kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan Sah secara hukum. Pada akte kelahiran anak dari para pemohon tersebut, serta didaftarkan kedalam buku register yang diperuntukkan untuk keperluan itu dan diberikan catatan pinggir."*;

Menimbang, bahwa pendaftaran administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (11):

*"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus di laporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap."*

Pasal 1 ayat (17):

*"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."*

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3:

*"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil."*

Pasal 52:

*(2) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;*

Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;*
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diatur mengenai pencatatan pengesahan anak dan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling **lambat 30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk lalu berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” yang dalam prakteknya diajukan melalui permohonan perdata, sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut memberikan kaidah hukum, “Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan guna tertibnya administrasi kependudukan, oleh karena pengesahan anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah termasuk “*peristiwa penting lainnya*” dan hal tersebut telah dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa adalah kewajiban yang bersangkutan (Para Pemohon) untuk melaporkan perubahan kutipan akta kelahiran atas nama **anak CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI** di mana kelahiran anak tersebut dicatatkan yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat **30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon guna untuk dicatatkan pada register pengesahan anak yang sedang berjalan dan sebagai dasar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur menarik dan menerbitkan kembali Kutipan Akta kelahiran atas nama **anak CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI** sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan demikian hakim berpendapat bahwa petitum ke-5 (lima) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karena itu permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Para Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara dan para pemohon tidak pernah mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum nomor 6 (enam) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan pengadilan, Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5311-KW-04122023-0001, yang dikeluarkan pada tanggal 4 Desember 2023, sehingga perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa anak atas nama **CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI**, anak Laki-Laki, lahir di Payeti, tanggal 29 Agustus 2022, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 5311-LT-01122023-0016 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2023, adalah anak sah dari Para Pemohon menurut hukum;
4. Menyatakan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan penambahan nama Ayah/ **PEMOHON I (NAMU YANTO UMBU LAPU)** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-01122023-0016 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2023, atas nama CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI;
5. Memerintahkan kepada Para Pemohon, paling lambat **30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan dan menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatat tentang Penetapan Pengesahan Anak dan penambahan nama ayah **NAMU YANTO UMBU LAPU (Pemohon I)** pada kutipan akta kelahiran atas nama anak CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI serta sebagai dasar untuk menarik dan menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak CAHAYA PURNAMA UMBU LUKI sesuai keadaan yang sebenarnya;
6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Wgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan tersebut ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 21 Desember 2023**, oleh **HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Wgp, tertanggal 14 Desember 2023, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga melalui sistem Persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ERWIN IMANUEL TELNONI, A.Md., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

ERWIN IMANUEL TELNONI, A.Md., S.H. HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.

## RINCIAN BIAYA:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00                                   |
| 2. Biaya Proses     | : Rp 110.000,00                                  |
| 3. Meterai          | : Rp 10.000,00                                   |
| Total               | : Rp 150.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) |

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Wgp